

## BAB VI

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Anti-LGBT yang disahkan di Hungaria pada tahun 2021 menandai kemunduran signifikan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak minoritas seksual. UU tersebut secara sistematis membatasi akses informasi dan ekspresi identitas gender serta orientasi seksual di ruang publik, khususnya dalam sektor pendidikan, media, dan kampanye publik. Hal ini menyebabkan terjadinya iklim represif dan stigmatisasi terhadap komunitas LGBT di Hungaria. Dalam konteks ini, Uni Eropa sebagai aktor normatif telah memberikan respons yang cukup tegas melalui kecaman politik dan upaya hukum, namun efektivitasnya masih terbatas.

Dari perspektif teori *Normative Power Europe (NPE)*, Uni Eropa berupaya menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum melalui pendekatan hukum dan tekanan finansial. Uni Eropa telah mengaktifkan berbagai instrumen legal seperti infringement procedure di Mahkamah Eropa, penerapan conditionality mechanism yang menangguhkan dana pemulihan COVID-19 dan akses ke program Erasmus+, serta pengaktifan Pasal 7 TEU. Namun demikian, meskipun UE berhasil memobilisasi respons yang kuat secara normatif, nilai-nilai Eropa yang dijunjung tinggi tidak berhasil diinternalisasi oleh pemerintah Hungaria. Hal ini menunjukkan keterbatasan strategi kekuatan normatif dalam menghadapi negara anggota yang mengalami regresi demokrasi dan mengedepankan politik identitas konservatif.

Sementara itu, dalam perspektif teori *Hak Asasi Manusia (HAM)*, tindakan Uni Eropa dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak fundamental, khususnya hak kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Upaya hukum yang dilancarkan oleh UE merupakan refleksi dari komitmen lembaga regional

dalam menegakkan prinsip universalitas HAM. Akan tetapi, keberhasilan dari intervensi ini tetap sangat tergantung pada komitmen domestik negara anggota. Dalam kasus Hungaria, resistensi terhadap tekanan hukum dan normatif UE menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum sepenuhnya terjamin ketika berada dalam konflik dengan agenda nasionalis-konservatif negara anggota.

Secara umum, efektivitas upaya hukum yang dilakukan Uni Eropa dalam merespons legislasi diskriminatif ini dapat dikatakan belum berhasil secara substansial. Meskipun terdapat tekanan politik, pencabutan dana, serta prosedur hukum yang aktif, Undang-Undang Anti-LGBT tetap berlaku di Hungaria hingga saat ini. Dengan kata lain, respon UE hanya berdampak sebagai bentuk delegitimasi moral dan politis, namun belum mampu mencabut atau membatalkan UU secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan NPE maupun mekanisme perlindungan HAM regional menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan otoritarianisme elektoral dan budaya politik yang tidak selaras dengan nilai-nilai liberal.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa dalam konteks regionalisme normatif seperti Uni Eropa, penegakan nilai-nilai bersama membutuhkan lebih dari sekadar mekanisme hukum dan tekanan ekonomi. Diperlukan penguatan budaya politik demokratis dan pengarusutamaan nilai-nilai HAM dalam sistem politik domestik negara anggota. Tanpa komitmen internal dari negara anggota, strategi normatif yang diandalkan oleh Uni Eropa hanya akan menghasilkan resistensi dan fragmentasi nilai di dalam tubuh Uni itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respons Uni Eropa terhadap Undang-Undang Anti-LGBT Hungaria merepresentasikan upaya maksimal dalam kerangka hukum dan normatif yang tersedia. Namun, efektivitas aktual dari respons tersebut masih menghadapi tantangan struktural dan ideologis yang signifikan. Ke depan, perlu adanya strategi yang lebih adaptif dan inklusif, yang tidak hanya mengandalkan aspek sanksi dan litigasi, melainkan juga mempromosikan pendidikan nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam masyarakat sipil negara anggota yang mengalami regresi nilai demokratis.